

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH MULTIJASA PADA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI SEKOLAH KELUARGA NASABAH**

(Studi pada BPR Syariah Kotabumi)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Jaka Dhamara Mahardika

NPM : 1551020188

Program Studi : Perbankan Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020 M

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH MULTIJASA PADA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI SEKOLAH KELUARGA NASABAH
(Studi pada BPR Syariah Kotabumi)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan manusia, termasuk masalah – masalah yang berkaitan dengan pendidikan tidak cukup dipikirkan dan dipecahkan oleh sekelompok masyarakat atau bangsa tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab antara suatu bangsa dan bangsa lainnya. BPR Syariah Kotabumi mengemban amanah sosial untuk berperan dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut, dengan memberikan pembiayaan untuk pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang disalurkan BPR Syariah Kotabumi adalah *ijarah* multijasa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi aplikasi *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi? dan bagaimana peran produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah keluarga nasabah di BPRS Kotabumi? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi dan mengetahui peran produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan partisipasi sekolah keluarga nasabah BPRS Kotabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bersifat penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan sampel *purposive sampling*, berjumlah 20 responden nasabah dan karyawan seperti Manajer Marketing, Account Officer, Administrasi, Legal Officer, Remedial. Untuk memperoleh berbagai data-data dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi dimulai pada saat nasabah datang ke Bank dengan mengajukan pembiayaan, memenuhi persyaratan administrasi berupa berkas yang dibutuhkan, setelah rapat marketing, nasabah akan dihubungi untuk melakukan akad dan pencairan dana. Ditinjau dari pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum yang mengatur tentang *ijarah*, akad yang diterapkan di BPRS Kotabumi pada produk *ijarah* multijasa pembiayaan pendidikan belum sesuai sebagai mana fatwa DSN MUI yang mengatur pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*. Dengan pembiayaan yang didapatkan oleh para nasabah membantu orangtua atau wali mengatasi masalah biaya kebutuhan sekolah yang sewaktu-waktu dibutuhkan segera. Pembiayaan ini juga membantu secara psikis anak atau anggota keluarga nasabah yang masih bersekolah, meningkatkan partisipasi sekolah, motivasi untuk terus berkembang dan meraih cita-cita tanpa terlalu memikirkan faktor ekonomi yang biasanya menjadi masalah dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Kata Kunci : Ijarah Multijasa, Pembiayaan Pendidikan, Partisipasi Sekolah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH
MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKOLAH
KELUARGA NASABAH (Studi pada BPR Syariah
Kotabumi)**

Nama : Jaka Dhamara Mahardhika

NPM : 1551020188

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I, M.S.I

NIP. 198008012003121001

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK HARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKOLAH KELUARGA NASABAH (Studi pada BPR Syariah Kotabumi)**. Disusun oleh **Jaka Dhamara Mahardhika, NPM: 1551020188** Jurusan Perbankan Syari'ah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu/29 Januari 2020

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Dr. H. Nasrudin, M.Ag

Penguji 1 : Nurlaili, M.A

Penguji 2 : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 1980080120031221001

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(Q.S. Al-Qashash (28) : 26)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat bertahan sampai saat ini dan bisa menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak saya Dirhansyah dan Ibu saya Maryati Abusroh yang sangat sayangi dan banggakan, yang selalu memberikan dukungan semangat baik material maupun moril. Karena tanpa doa dari orang tua sangat mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah menghantarkanku menjadi orang yang berilmu, berbudi, dan bertanggung jawab.
3. Untuk adikku Dara Cantika Kinanti yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang serta doa.
4. Untuk seluruh keluarga besar saya yang memberikan dukungan moril maupun material sehingga bisa menyelesaikan pendidikan ini.
5. Untuk para karyawan BPRS Kotabumi terutama Bapak Tommy, Bapak Edward, Bapak Agus, Bapak Anwar, Bapak Imadudin, Bapak Hervan serta Mbak Wenda yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman seperjuangan saya di kelas Perbankan Syariah E Angkatan 2015 terkhusus Riza Andesta, Muhammad Amar Rido, Linggar Prada Putra, Edi Setiadi, M. Barmawi Arifin, M. Zhafar MZ, Abdul Latif,

Rio, Imron, serta Firman Hidayat yang telah menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan memotivasi saya menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk sahabat saya Rini Karina Agustini yang selalu bersedia menjadi tempat untuk bercerita disaat saya mulai lelah mengerjakan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabat saya Bagas Fajar Perdana, Rendi Bagas Prabowo, Kholilul Rahman, Zullistin Hasanah, dan Fadilatunnisa yang telah berjuang bersama dalam memperoleh gelar ini.
9. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
10. Untuk Cici Danilla Riyadi yang telah menemani saya dalam menulis skripsi ini lewat karya-karyanya.
11. Untuk para personil Naif, The Rain, Kang Mawang, serta Mas Kunto Aji yang telah berkontribusi menghibur saya disaat penat mengerjakan skripsi.
12. Untuk Abang Gofar Hilman dan Abang Rizky Firdaus Wijaksana yang telah memotivasi saya untuk terus belajar menjadi orang yang jujur.
13. Untuk podcast Rapot, Boker, Box2Box, Unfaedah, serta Do You See What I see yang menemani saya disaat rehat mengerjakan skripsi ini.
14. Universitas Islam Negeri Lampung yang menjadi kampus tempatku menemukan wawasan baru dan almamaterku tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Jaka Dhamara Mahardhika, putra sekaligus anak pertama Bapak Dirhansyah dan Ibu Maryati Abusroh yang lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 Maret 1997. Pendidikan yang telah ditempuh penulis:

1. Pendidikan TK Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Kotabumi, Lampung Utara ditempuh dari Tahun 2002 diselesaikan pada Tahun 2003.
2. Pendidikan SD Negeri 05 Kelapa Tujuh Kotabumi, Lampung Utara ditempuh dari Tahun 2003 diselesaikan pada Tahun 2009.
3. Pendidikan SMP Negeri 07 Kotabumi, Lampung Utara ditempuh dari Tahun 2009 diselesaikan pada Tahun 2012.
4. Pendidikan SMA Negeri 03 Kotabumi, Lampung Utara ditempuh dari Tahun 2012 diselesaikan pada Tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hinayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Keluarga Nasabah (Studi pada BPRS Kotabumi).

Shalawat beserta salam semoga senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelapan hingga menuju jaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa penulis tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu melalui skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I Selaku dosen Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
 5. Bapak Amrullah Direktur Utama dan Bapak Tommy Adriansyah selaku Manajer Marketing BPRS Kotabumi, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
 6. Bapak dan Ibu saya tercinta, adikku dan teman-teman saya, serta semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas dan menjadikan amal shaleh kepada pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Amin
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar lampung, 21 November 2019
Penulis

Jaka Dhamara Mahardhika
NPM. 1551020188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	11
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Bank Syariah	20
a. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia	20
b. Pengertian Bank Syariah	21
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	25
a. Bentuk Hukum BPRS.....	25
b. Pendirian BPRS.....	26
c. Kepemilikan BPRS	27
d. Macam-macam Akad di BPRS	27
3. Pembiayaan	33
a. Pengertian Pembiayaan	29
b. Unsur-unsur Pembiayaan	30
c. Tujuan Pembiayaan.....	31
d. Jenis-jenis Pembiayaan	32
4. Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Akad <i>Ijarah</i>	35
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	36
b. Macam-macam <i>Ijarah</i>	38
c. Rukun dan Ketentuan Syariah <i>Ijarah</i>	42
d. Pengertian Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa	43
e. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa	43

f. Ketentuan Umum dalam Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa	44
g. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dasar <i>Ijarah</i>	44
5. Partisipasi Sekolah Keluarga	45
B. Tinjauan Pustaka	46
BAB III DESKRIPSI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi	49
1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi	49
2. Profil BPRS Kotabumi	50
3. Visi dan Misi BPRS Kotabumi	50
4. Produk-produk BPRS Kotabumi	51
5. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi	58
B. Mekanisme Produk <i>Ijarah</i> Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan di BPRS Kotabumi	59
C. Proses Pemberian Pembiayaan Pendidikan produk <i>ijarah</i> multijasa di BPRS Kotabumi	69
D. Data Nasabah <i>Ijarah</i> Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan di BPRS Kotabumi	75
E. Karakteristik Nasabah	76
F. Karakteristik Jawaban Nasabah.....	77
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Produk <i>Ijarah</i> Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan di BPRS Kotabumi	90
B. Implementasi Peran Produk <i>Ijarah</i> Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Keluarga Nasabah BPRS Kotabumi.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Nasabah Produk Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan di BPRS Kotabumi Tahun 2015-2019	10
2. Data Responden nasabah Produk Ijarah Multijasa BPRS Kotabumi 2019...	76
3. Distribusi Jawaban Berdasarkan Usia.....	77
4. Distribusi Jawaban Berdasarkan Jenis Kelamin	78



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi.....	59
2. Skema Ijarah Multijasa Pembiayaan Pendidikan.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara produk Ijarah Multijasa pada
Pembiayaan Pendidikan BPRS Kotabumi
- Lampiran 3 : Aplikasi Pembiayaan BPRS Kotabumi
- Lampiran 4 : Surat Pra Riset
- Lampiran 5 : Balasan Surat Pra Riset BPRS Kotabumi
- Lampiran 6 : Surat Riset
- Lampiran 7 : Balasan Surat Riset BPRS Kotabumi
- Lampiran 8 : SK Pembimbing
- Lampiran 9 : Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis ingin menegaskan dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam penelitian ini, guna menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Keluarga Nasabah”** maka penulis akan memberikan penegasan pengertian istilah yang terkandung dalam judul tersebut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab)¹
2. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pengembangan verksi kerja sistem dari desain yang diberikan.²
3. *Ijarah* Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.³
4. Pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang

¹Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Implementasi” (Online), tersedia di: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi> (13 Agustus 2019).

³Sutan Remy Sjahdeeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 275.

mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan perabot/mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis gambar, kegiatan ekstra kulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi/pembinaan pendidikan, serta ketatausahaan sekolah.⁴

5. Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dsb) mempertinggi, memperhebat (produksi dsb).⁵
6. Partisipasi Sekolah adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.⁶
7. Keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, juga diartikan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁷ Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).⁸

⁴Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 27.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1025.

⁶Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, "Angka Partisipasi dalam Pendidikan" (Online), tersedia di <http://dispendik.pasuruankab.go.id/artikel-905-angka-partisipasi-dalampendidikan.html> (11 Agustus 2019).

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Keluarga" (Online), tersedia di <https://www.kbbi.web.id/keluarga> (07Agustus 2019).

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Nasabah" (Online), tersedia di <https://www.kbbi.web.id/nasabah> (07 Agustus 2019).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Pendidikan adalah sektor yang amat penting yang akan memproduksi Sumber Daya Manusia di suatu Negara. Namun, tidak semua masyarakat dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, termasuk masyarakat yang ada di daerah Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Keinginan untuk bersekolah tidak sebanding dengan kemampuan orang tua atau wali membiayai kebutuhan sekolah nya.

Bank Pembiayaan Syariah Kotabumi hadir guna mengemban amanah sosial untuk mengatasi masalah pendidikan terutama biaya sekolah yang sangat tinggidi Kotabumi dengan memberikan solusi berupa pembiayaan pendidikan di bidang pendidikan dalam bentuk produk *ijarah* multijasa.

2. Alasan Subjektif

Secara subjektif, menurut penulis ketersediaan data atau informasi yang dibutuhkan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu, judul skripsi yang akan diteliti sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari, yaitu berkaitan dengan jurusan Perbankan Syariah.

C. Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran perbankan adalah wujud dari fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹ Setelah di berlakukannya UU No 21 Tahun 2008 pada bulan juli 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Indonesia menjadi dasar kemajuan perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Lampung terus meningkat dimana pada bulan Desember tahun 2017 OJK menyampaikan telah ada 11 BPR Syariah yang tersebar di seluruh kabupaten.¹¹ Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

⁹Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*(Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 1.

¹⁰UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 9.

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2017” tersedia di: www.ojk.go.id (29 April 2019).

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹²

Berbagai produk yang di tawarkan oleh lembaga keuangan BPR Syariah dalam penyaluran dana dengan beragam jenis akad dan bentuk pembiayaan. Salah satu produk yang di tawarkan adalah produk *ijarah* multijasa yang pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain.¹³ *Ijarah* di dalam islam telah menjadi kegiatan ekonomi yang di anjurkan sebagaimana dalam Al-Quran dan hadist berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتِجْرَاهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash : 26).¹⁴

Sedangkan dalam hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah yang Artinya :*“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).*¹⁵

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya

¹²PBI No 6/17/PBI/ Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 1.

¹³Tomy Adriansyah, Brosur Kepada Penulis, BPR Syariah Kotabumi, 29 April 2019.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 388.

¹⁵Lutfi Arif et al, *Bulughul Maram Five in One*(Jakarta: PT Mizan Publika, 2012), h.547.

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁶ Maka dari penjelasan tersebut akad *ijarah* dalam berbagai bentuk pembiayaan terutama *ijarah* multijasa sudah menjadi program saling menguntungkan di antara pihak lembaga dengan nasabah. *Ijarah* multijasa dalam pembiayaan pendidikan adalah salah satu dari variasi akad *ijarah* multijasa itu sendiri. Tujuan dari pembiayaan *ijarah* multijasa pada pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan masyarakat.

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Lampung Utara mendata ada sebanyak 361 anak putus sekolah pada tahun 2018, data tersebut terdiri dari 172 siswa SD dan 189 siswa SMP.¹⁷ Dengan demikian anak putus sekolah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun berbagai hal biaya pendidikan menjadi alasan bagi masyarakat dalam ketidakmampuan untuk membiayai biaya sekolah anaknya. Meskipun selama ini pendanaan pendidikan ditempuh lewat bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah gratis, dan sekarang Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya sekolah tetap dirasakan berat bagi masyarakat miskin sebagian besar masyarakat menganggap masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik.

¹⁶Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001, edisi 4), h. 138.

¹⁷Tribun News Lampung, “Angka Anak Putus Sekolah di Lampura Menurun” (Online), tersedia di: <http://lampung.tribunnews.com/2018/12/19/angka-anak-putus-sekolah-di-lampura-menurun> 29 April.

Sektor pendidikan inilah yang akan memproduksi SDM Negara, yang akan membawa negara tersebut apakah kearah yang lebih baik di masa depan, atau sebaliknya, malah memperburuk kondisi negara di masa yang akan datang. Menurut Guru Besar IPB Didin Hafidhuddin (2010), pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang, sehingga dalam sepanjang sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, meskipun dengan sistem dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup dan budaya masyarakat masing-masing. Bahkan, pendidikan juga dijadikan sarana penerapan suatu pandangan hidup. Tujuan akhir dari proses ini adalah terciptanya *civil society* yang memiliki karakter yang baik (al insan al kamil).¹⁸

Pandangan bahwa hal-hal yang menyangkut kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan manusia, termasuk masalah – masalah yang berkaitan dengan pendidikan tidak cukup dipikirkan dan dipecahkan oleh sekelompok masyarakat atau bangsa tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab antara suatu bangsa dan bangsa lainnya.¹⁹ Bagi pemerintah sikap adil dan seimbang termanifestasikan dalam kebijakan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyatnya.²⁰

¹⁸Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 150.

¹⁹Abuddin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 43.

²⁰*Ibid.* h. 50.

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan solusi atas masalah pendidikan khusus nya di Kabupaten Lampung Utara yaitu BPR Syariah Kotabumi.

BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008. BPR Syariah Kotabumi mengemban amanah sosial untuk berperan dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut.

Bentuk upaya yang dapat dilakukan BPRS Kotabumi adalah dengan memberikan pembiayaan untuk pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang di salurkan BPR Syariah Kotabumi adalah *ijarah* multijasa. Pembiayaan *ijarah* multijasa bidang pendidikan yang di tawarkan oleh BPRS ini hanya di peruntukkan untuk nasabah yang mampu memberikan dan memenuhi syarat, seperti nasabah PNS dan nasabah yang dapat memberikan jaminan.

Produk *ijarah* multijasa untuk biaya pendidikan pada BPR Syariah sudah tentu memiliki prosedur tersendiri sehingga pembiayaan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan memberikan manfaat tersendiri. Dengan demikian, tujuan pembiayaan yang diberikan adalah meningkatkan partisipasi sekolah, namun pembiayaan ini tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat dikarenakan syarat yang harus dipenuhi. Selain dari itu pembiayaan ini di salurkan untuk memperoleh keuntungan dengan kepatuhan nasabah untuk membayar angsuran tanpa pengawasan yang lebih ketat dari pihak BPRS terkait pengaplikasian produknya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah, yang berjudul Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Simpanan Pelajar Prestasi (SUPERPRESTASI) di BMT Harapan Umat Kudus yang bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur bagi hasil simpanan pelajar prestasi di BMT Harapan Umat Kudus. Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tabungan Superprestasi di BMT Umat Kudus sangatlah mudah dan biaya pembukaan rekening.²¹

Berikut ini adalah data nasabah produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi.

Tabel 1.
Jumlah Nasabah Produk *Ijarah* Multijasa pada
Pembiayaan Pendidikan di BPRS Kotabumi Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Nasabah	Besaran Plafon
2015	1.699	64.260.325.213
2016	2.737	67.199.950.000
2017	3.020	99.047.700.000
2018	2.711	112.569.100.000
2019	2.650	118.452.300.000

Sumber : BPRS Kotabumi Lampung Utara

Tabel 1 di atas menggambarkan data nasabah *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan tahun 2015-2019 yang diberikan BPRS Kotabumi. Meski Besaran plafon yang diberikan meningkat dari tahun ke tahun, namun jumlah nasabah yang menggunakan produk ini mengalami fluktuatif.

²¹Nur Khasanah, "Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Simpanan Pelajar Prestasi". (Skripsi Program Ahli Madya Ilmu Perbankan Syariah Insititut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014), h.35.

Berdasarkan uraian di atas, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Lampung Utara ini sangat menarik untuk diteliti, jadi peneliti mencoba melihat bagaimana penerapan program Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada bidang Pendidikan dalam meningkatkan semangat melanjutkan sekolah di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini dilakukan dengan judul “ **Analisis Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Keluarga Nasabah** (studi pada BPR Syariah Kotabumi) ”.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dikerjakan lebih fokus dan terarah, peneliti berpikir permasalahan penelitian yang diangkat perlu diberikan batasan masalahnya yaitu tentang implementasi produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah keluarga nasabah di BPRS Kotabumi.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi aplikasi produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi?
2. Bagaimana peran produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah keluarga nasabah di BPRS Kotabumi?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi aplikasi produk ijarah multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi.
2. Untuk mengetahui peran produk ijarah multijasa pada pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan partisipasi sekolah keluarga nasabah BPRS Kotabumi.

G. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat diperoleh atau didapatkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengetahui seberapa berperan nya produk *ijarah* multijasa pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah keluarga nasabah BPRS Kotabumi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dalam menjadi gambaran kinerja BPRS Kotabumi dan menjadi bahan evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja produk *Ijarah*. Multijasa khususnya pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi.

I. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²²

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman pada suatu masalah.²³ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenal fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah keluarga nasabah di BPRS Kotabumi.

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dengan pihak-pihak terkait. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁵

2. Sumber Data

Data dan sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak usaha dan aparat pemerintah.²⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Manajer Marketing BPRS Kotabumi Bapak Tommy Adriansyah dan dari nasabah BPRS yang menggunakan produk ijarah multijasa pada pembiayaan pendidikan.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*..., h. 9.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 117.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (interview) ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diskonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan Manajer Marketing, maupun nasabah yang menggunakan produk ijarah multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

²⁷*Ibid.*

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*..., h. 231.

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.²⁹ Pada dokumentasi peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang tersedia di Kantor BPR Syariah Kotabumi.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Lebih luas lagi, observasi ialah suatu pengamatan penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses, kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁰

Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun ke lapangan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah tertentu yang akan diamati/diteliti.³¹ Poopulasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek

²⁹*Ibid.* h. 139.

³⁰*Ibid.* h. 240.

³¹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h.101.

itu.³² Adapun populasi penelitian ini adalah jumlah nasabah yang menggunakan produk ijarah multijasa pada pembiayaan pendidikan yakni berjumlah 2.650 nasabah serta semua pihak yang berkaitan dengan produk *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi baik Manajer *Marketing*, *Account Officer*, Administrasi, Remedial.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³³ Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).³⁴ Pengambilan sampel data diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Ciri-ciri khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa yang menjadi sampel adalah Karyawan BPRS Kotabumi yang bertanggung jawab atas produk *ijarah* multijasa pada pembiayaan pendidikan seperti Manajer *Marketing*, *Account Officer*, Administrasi, *Legal Officer*, Remedial, serta nasabah yang menggunakan produk *ijarah* multijasa selama satu sampai dua tahun dan juga nasabah yang berumur 20 hingga diatas 40 tahun. Jumlah populasi yang besar menyebabkan peneliti tidak mungkin dapat mempelajari keseluruhan populasi, dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*..., h. 80.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148.

³⁴ *Ibid.* h. 81.

diambil dari populasi. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan besar sampel adalah rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + N \cdot d^2)}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = tingkat kesalahan 22% = 0,0484 (tingkat kepercayaan 78%)

$$n = \frac{2650}{(1 + 2650 \cdot 0,0484^2)}$$

$$= \frac{2650}{129,26}$$

$$= 20,50$$

$$n = 20.$$

Dengan penentuan sampel ini, didapatkan sebanyak 20 orang nasabah ijarah multijasa pada pembiayaan pendidikan di BPRS Kotabumi.

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, penelitian dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya.

³⁵Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran....*, h. 152.

³⁶Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D....*, h. 335.

Semua data yang terkumpul diolah sistematis dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti.³⁷

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.³⁸

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 31.

³⁸ *Ibid.* h. 32.

b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)³⁹ :

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh Bank Konvensional, akan tetapi

³⁹ *Ibid.* h. 33.

aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.⁴⁰ Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain, dilakukan terpisah. Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:

1) Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank Umum Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* h. 51.

⁴¹ *Ibid.* h. 52.

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank Umum Syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

3) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank Umum Syariah menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.⁴²

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor atau unit yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008).

⁴² *Ibid.* h. 53.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

1) Penghimpunan Dana Masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan wadiah, mudharabah, dan deposito mudharabah. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah.⁴³

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan

⁴³ *Ibid.* h. 55.

akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

3) BPRS Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS.⁴⁴

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Bentuk Hukum BPRS

1) Perseroan Terbatas

Bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2) Perusahaan Daerah

Bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.⁴⁵

3) Koperasi

Bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT . Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 397.

3. Pendirian BPRS

- a. BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- b. BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI, Pemerintah Daerah.
- c. Jumlah modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS sekurang-kurangnya sebesar:
 - 1) Rp. 2.000.000.000 untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
 - 2) Rp. 1.000.000.000 untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota propinsi di luar wilayah sebelumnya.
 - 3) Rp. 500.000.000 yang didirikan di daerah.
- d. Modal disetor bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian.⁴⁷
- e. Bagian dari modal disetor BPRS yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%

⁴⁶ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* h. 398.

4. Kepemilikan BPRS

Kepemilikan BPRS oleh badan hukum setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank atau pihak lain di Indonesia, selain itu sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah juga dilarang.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS adalah pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPRS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.⁴⁸

5. Macam-macam Akad di BPRS

a. *Wadiah*

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* h. 407

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, h. 59.

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shaibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁵⁰

c. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁵¹

d. *Istishna*

Istishna merupakan akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan mejualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.⁵²

⁵⁰ *Ibid.* h. 83.

⁵¹ *Ibid.* h. 138.

⁵² *Ibid.* h. 146.

e. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak.⁵³

f. *Ijarah*

Ijarah adalah pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁵⁴

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atas financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan. Piutang, qardh, surat berharga, penempatan, penyertaraan modal, penyertaraan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah*.⁵⁵

⁵³ *Ibid.* h. 153.

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 161.

⁵⁵ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681.

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan /diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena yang disalurkan tidak dapat kembali.⁵⁶

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 107.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

7) Balas Jasa

Merupakan balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁵⁷

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.* h. 108.

⁵⁸ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi....*, hl. 681.

- 3) Meningkatkan produktifitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1) Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan

a) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

b) Pembiayaan Modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

c) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁵⁹

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*,h. 114.

2) Pembiayaan berdasarkan Jangka Waktu

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya melebihi tiga tahun.

3) Pembiayaan berdasarkan Sektor Usaha

a) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki manfaat lebih tinggi.

b) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.⁶⁰

c) Sektor Pertanian Peternakan Perikanan dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* h. 115.

d) Sektor Jasa

(1) Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya.

(2) Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak risiko.

(3) Jasa Angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara.

e) Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

4) Pembiayaan berdasarkan Jaminan

a) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.⁶²

b) Pembiayaan Tanpa Jaminan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* h. 118.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.

5) Pembiayaan berdasarkan Jumlahnya

a) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-.

c) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.⁶³

⁶³ *Ibid.* h. 119.

6) Pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan non produktif:

a) Berdasarkan prinsip bagi hasil:

(1) Pembiayaan *murabahah*

(2) Pembiayaan *musyarakah*

b) Berdasarkan prinsip jual beli (piutang):

(1) Pembiayaan *murabahah*

(2) Pembiayaan *salam*

(3) Pembiayaan *istishna*

c) Berdasarkan prinsip sewa:

(1) Pembiayaan *ijarah*

(2) Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina*

4. Pembiayaan Mutijasa berdasarkan Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologis *ijarah* berasal dari kata *ajaraya* 'juru yang berartri upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu., atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁶⁴

Menurut fatwa DSN, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada

⁶⁴Ath-Thayyar, et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Madarul-wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), h. 311.

perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁶⁵

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah yang berasal dari kata *ajaraya* 'juru yang berarti upah'.⁶⁶ Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya adalah manfaat jasa. Penggunaan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa karena pembiayaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka seharusnya boleh pula akad jual *ijarah* atas manfaat.⁶⁷

c. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Pihak yang menyewakan harus mempersiapkan barang untuk dapat digunakan penyewa secara optimal. Bila ada kekurangan terhadap barang tersebut, yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak.

⁶⁵Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan edisi 4* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 138.

⁶⁶Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab....*,h. 331.

⁶⁷"Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa" (On-line), tersedia di <http://www.serambinews.com>, di akses pada tanggal 29 April 2019 15.00 WIB.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang agar tetap utuh.⁶⁸

d. Macam-macam Ijarah

1) *Ijarah* berdasarkan objek akad:

- a) *Ijarah 'ala al-manafi* yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.
- b) *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah* yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Keran itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).⁶⁹

2) *Ijarah* berdasarkan Kepemilikan Aset

- a) *Ijarah*, dalam akadnya kepemilikan aset tetap akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir.
- b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), dalam akadnya penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada masa sewa berakhir.⁷⁰

⁶⁸ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan edisi 4....*, h. 138.

⁶⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 85.

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah....*, h. 160.

e. Rukun dan Ketentuan Syariah *Ijarah*

Rukun *ijarah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 2) Obyek akad *ijarah* berupa : manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- 3) Ijab Kabul/serah terima.

Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/sela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui koresponden atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁷¹ Sedangkan Ketentuan Syariah nya adalah:

- a) **Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.**
- b) **Obyek akad *ijarah***

Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut:

- (1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak rusak.
- (2) Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan) : maka *ijarah* atas obyek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi atau menjual khamar dan lain sebagainya.

⁷¹*Ibid.* h. 237.

(3) Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya.⁷²

(4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik.

(5) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas misalnya 2 tahun.

c) **Sewa dan Upah**, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.

(1) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.

(2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan obyek akad.

(3) Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda.

⁷²Nurhayati, Sri, Wasiah, *Akuntansi Syariah Indonesia* edisi 3 (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 236.

d) Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacar atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*. Menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Badaa'iuash-Shanaa, iu, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Obyek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- (2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- (3) Wafatnya salah seorang yang berakad.

- (4) Apabila ada uzur dari salah pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-ijarahnya batal.⁷³

Sementara itu, pada fiqih sunnah Sayyid Sabiq *Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila hal-hal sebagai berikut:

- (a) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan menyewa (*musta'jir*).
- (b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- (c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- (d) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- (e) Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁷⁴

⁷³Abdul Rohman Ghazaly, et. al. *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2010), h. 283.

⁷⁴*Ibid.* h. 284.

f. Pengertian Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.⁷⁵

Sedangkan transaksi *ijarah* dalam pembiayaan multijasa adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik modal obyek sewa, termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.⁷⁶

g. Dasar Hukum Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Pada zaman Rasulullah telah diperoleh peminjaman atas seseorang, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233.⁷

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁷⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.210.

⁷⁶A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 187.

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁷⁷

h. Ketentuan Umum dalam Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

- 1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- 3) Besar Ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk presentase.⁷⁸

i. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa Atas Dasar Akad *Ijarah*

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, dan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun bentuk pembebasan utang.⁷⁹

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Materi Akhlak Mulia* (Jakarta: PT.Madinah, 2004), h. 45.

⁷⁸Fatwa DSN-MUI NO 44/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

⁷⁹A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 191.

5. Partisipasi Sekolah Keluarga

Partisipasi sekolah diartikan sebagai keterlibatan masyarakat atau anggota keluarga untuk bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Partisipasi sekolah ini menghasilkan pemberdayaan bagi setiap masyarakat, yakni anggota keluarga dapat mengenyam dan memperoleh pendidikan yang layak.⁸⁰

Dengan adanya partisipasi sekolah, maka dapat diketahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai apakah anggota pendidikan yang semakin besar berkorelasi terhadap pemertaan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang sekolah. Karena pendidikan merupakan sarana bagi terciptanya generasi yang lebih baik dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat terwujud iklim kehidupan sosial yang lebih baik.⁸¹

Partisipasi sekolah dipengaruhi oleh ketersediaan daya tampung sekolah, ruang kelas maupun pemerataan sarana, peran penyelenggara pendidikan negeri/swasta, letak daerah tempat tinggal. Partisipasi sekolah bagi penduduk yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di pedesaan. Tingkat pendapatan yang merata dan minat anak untuk bersekolah juga menjadi faktor tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah.⁸²

⁸⁰ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 63.

⁸¹ Dini Amaliah, "Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Misikin". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 2 No.3 (November 2015), h. 234.

⁸² Prima Yunita Paramata, "Strategi Peningkatan Partisipasi Sekolah Program Wajib Belajar Jalur Pendidikan Formal di Kabupaten Bogor". (*Tesis Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah*, 2012), h. 17-19.

B. Tinjauan Pustaka

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa jurnal dan skripsi yang dapat mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah, yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Simpanan Pelajar Prestasi (SUPERPRESTASI)” di BMT Harapan Umat Kudus yang bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur bagi hasil simpanan pelajar prestasi di BMT Harapan Umat Kudus. Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tabungan Superprestasi di BMT Umat Kudus sangatlah mudah dan biaya pembukaan rekening.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fajar Suryanti, yang berjudul Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menyimpulkan bahwa Pembiayaan Multijasa ini menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* dan akad *kafalah*. Akad *kafalah* digunakan sebagai akad tambahan sebagai pengikat jaminan, yang berfungsi mencegah adanya penyelewengan dana. Di dalam pelaksanaan pembiayaan ini perlu adanya peningkatan baik berupa kualitas

pelayanan nasabah dengan menambah karyawan sehingga dalam proses pelayanan nasabah dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik.⁸³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Anwar Abidin dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu”, menyimpulkan bahwa Manajemen Pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam peningkatan mutu dikarenakan dengan manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel maka akan muncul kepercayaan dari *stakeholder* dan itu akan menjadi motivasi dari setiap pelajar untuk meningkatkan mutu dalam bidangnya masing-masing.⁸⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyah Hayati dalam jurnalnya yang berjudul “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)”, membahas alternatif pembiayaan *ijarah* multijasa untuk pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemabayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak bank bisa melalui investor untuk melakukan pembayaran ke lembaga pendidikan dan melalui nasabah itu sendiri dengan akad *wakalah*. Dengan adanya transaksi *ijarah* multijasa diharapkan orangtua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar pendidikan

⁸³Siti Fajar Suryati, “Pembiayaan Multijasa di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”. (Skripsi Program Ahli Madya Ilmu Manajemen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014), h. 110.

⁸⁴Achmad Anwar Abidin, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu”. *Jurnal STAI Darrutaqwa*. (Februari 2017), h. 98-99.

anaknya dapat mengajukan pembiayaan iniu, sehingga fenomena anak putus sekolah dapat diminimalisir.⁸⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Mar'atus Solihah dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa dari segi pelaksanaannya, akad *ijarah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di LKS untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan kurang sesuai dengan hukum islam. Karena pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan harus terlibat kerjasama, sedangkan dalam pelaksanaannya pihak rumah sakit atau sekolah yang menjadi penyedia objek sewa tidak menjalin kerjasama dengan LKS dan juga tidak mengetahui bahwa dalam transaksi nya ada pihak yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan anggota.⁸⁶

Dengan beberapa hasil penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan. Letak perbedaan ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan dan lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti menitik beratkan pada implementasi produk *ijarah* pada pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah keluarga nasabah di BPRS Kotabumi.

⁸⁵Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)”. *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2014), h. 78-86.

⁸⁶Ajeng Mar'atus Solihah, “Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Az Zarka*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), h. 117.